

BUPATI PEMALANG TARGETKAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BAKU DI PULOSARI SELESAI TAHUN 2023



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/12/IM-G-20231012-WA0024-2110958260.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG-suaramerdeka-pantura.com- Bupati Pemalang, Mansur Hidayat menargetkan pada tahun 2023 pembangunan jaringan air baku di Kecamatan Pulosari selesai. Jaringan air baku Pulosari menjadi salah satu program dalam Peraturan Presiden (Perpres) 79 tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan ekonomi.

“Pembangunan ekonomi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang dengan anggaran dari APBN sebesar 200 milyar. Tahun 2022 dilaksanakan Pembangunan fisik oleh Kementerian PU PR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dengan nilai kontrak Rp 22,4 miliar,” ujar Mansur Hidayat, Rabu (11/10)/2023).

Mansur mengatakan, anggaran yang mencapai Rp 22,4 miliar tersebut untuk pembangunan jaringan dari sumber mata air di Desa Ketenger Banyumas, sampai ke reservoir di Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari.

Pembangunan tersebut dengan jangka waktu pekerjaan 14 Februari hingga 20 Desember 2023. Namun pekerjaan baru selesai 89 persen karena ada penghentian pekerjaan oleh KPH Banyumas Timur. Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen menyelesaikan masalah kesulitan air yang sudah lama terjadi di Kecamatan Pulosari.

“Alhamdulillah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) jaringan air baku Pulosari sudah turun. Tahun 2023 ini saya menargetkan pembangunan jaringan air

baku dari sumber mata air sampai ke reservoir di Desa Clekatakan selesai 100 persen,” imbuhnya.

Dia mengatakan, pembangunan tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,3 milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selanjutnya untuk pembangunan Jaringan Distribusi Umum (JDU) dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) yang meliputi Desa Batusari, Penakir, Clekatakan, Simereng, Pageteran, Pulosari dibutuhkan anggaran Rp 20 miliar. Untuk itu, pihaknya berupaya mengusulkan kepada Kementerian PU PR.

Sumber Berita:

1. <https://www.smpantura.news/bupati-targetkan-pembangunan-jaringan-air-baku-di-pulosari-selesai-tahun-2023/>, “Bupati Targetkan Pembangunan Jaringan Air Baku di Pulosari Selesai Tahun 2023”, tanggal 12 Oktober 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610479935/bupati-targetkan-pembangunan-jaringan-air-baku-di-pulosari-selesai-tahun-2023-pemalang-bupati-pemalang-mans>, “Bupati Targetkan Pembangunan Jaringan Air Baku di Pulosari Selesai tahun 2023 PEMALANG - Bupati Pemalang Mans”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, Pembangunan ekonomi kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang dengan anggaran dari APBN sebesar 200 milyar. Tahun 2022 dilaksanakan Pembangunan fisik oleh Kementerian PU PR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dengan nilai kontrak Rp 22,4 miliar.
Pembangunan tersebut dengan jangka waktu pekerjaan 14 Februari hingga 20 Desember 2023. Namun pekerjaan baru selesai 89 persen karena ada penghentian pekerjaan oleh KPH Banyumas Timur. Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen menyelesaikan masalah kesulitan air yang sudah lama terjadi di Kecamatan Pulosari.
- Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2023¹
Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja

¹ Kementerian Keuangan, “Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023”, diakses dari : <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>, pukul 12:31

negara tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD), yang jumlahnya mencapai Rp814,72 triliun, dengan rincian:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp136,26 triliun.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp396,00 triliun, terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp286,77 triliun dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp109,23 triliun untuk penggalangan formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp185,80 triliun terdiri atas:
 - a. DAK Fisik sebesar Rp53,42 triliun, untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan;
 - b. DAK Nonfisik sebesar Rp130,30 triliun, yang mencakup 12 (dua belas) jenis dana, dimana terdapat Penggabungan untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta Dana TPG, Tamsil Guru dan TKG di Daerah Khusus menjadi Dana Tunjangan Guru ASND untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOSP dan Tunjangan Guru, serta pemisahan dana BOK menjadi Dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi penyaluran; dan
 - c. Hibah Daerah sebesar Rp2,08 triliun.
4. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus sebesar Rp17,24 triliun.
5. Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,42 triliun.
6. Dana Desa sebesar Rp70,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.
7. Insentif Fiskal yang sebelumnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,00 triliun yang dilakukan melalui dua periode untuk Kinerja tahun sebelumnya Rp4,0 triliun dan Kinerja tahun berjalan Rp4,0 triliun, dengan mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah. Alokasi insentif fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya dibagi menjadi insentif fiskal untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun; dan insentif fiskal untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun.

Adapun rincian alokasi per daerah tersebut secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi